

LEMBAR PENGESAHAN NASKAH PUBLIKASI

Naskah Publikasi dengan Judul :

Keterlibatan Turki dalam Operasi Pembebasan Mosul di Iraq Tahun 2015-2016

DI IRAC TAHUN 2015-2016

Oleh:

Ayu Heryati Naqsa B

20140510371

Jurusan Ilmu Hubungan Internasional

Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

Jl. Ring Road Barat, Tarakan, Kasihan, Bantul, Daerah Istimewa

Ayu Heryati Naqsa B

20140510371

Email : ayu.heryati@umy.ac.id

ABSTRAK

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui tujuan kebijakan luar negeri pemerintah Turki yang memutuskan untuk terlibat dalam Operasi Pembebasan Mosul di Iraq tahun 2015 hingga 2016. Sebagaimana diketahui Turki memutuskan untuk terlibat tahun Operasi Pembebasan Mosul di Iraq tanpa mendapat izin dari pemerintah Iraq. Keterlibatan Turki tersebut dilakukan dengan mengirim senjata serta memberikan pelatihan militer kepada Peshmerga. Metode penelitian yang digunakan oleh penulis adalah teknik analisis kualitatif, yaitu dengan menggunakan data-data sekunder berupa surat kabar, jurnal, dan buku. Penelitian ini menggunakan keterlibatan Turki dalam Operasi Pembebasan Mosul sebagai objek penelitian, yaitu tujuan utama dan tujuan jangka menengah.

Yang Disetujui



Siti Muslikhati, S.IP.,M.Si

Dosen Pembimbing

Kata Kunci : Turki, Iraq, Operasi Pembebasan Mosul, Tujuan Kebijakan Luar Negeri.

KETERLIBATAN TURKI DALAM OPERASI PEMBEBASAN MOSUL

DI IRAQ TAHUN 2015-2016

Oleh:

Ayu Heryati Naqsa B

20140510371

Jurusan Ilmu Hubungan Internasional
Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

Jl. Ring Road Barat, Tamantirto, Kasihan, Tamantirto, Kasihan, Bantul, Daerah Istimewa
Yogyakarta 55184

Email : ayu.heryati.2014@fisipol.umy.ac.id

ABSTRAK

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui tujuan kebijakan luar negeri pemerintah Turki yang memutuskan untuk terlibat dalam Operasi Pembebasan Mosul di Iraq tahun 2015 hingga 2016. Sebagaimana yang diketahui bahwa Turki memutuskan untuk terlibat dalam Operasi Pembebasan Mosul meskipun tidak mendapat izin dari pemerintah Iraq. Keterlibatan Turki tersebut dilakukan dalam bentuk pengiriman senjata serta memberikan pelatihan militer kepada Peshmerga dan milisi Sunni *Nineveh Guard*. Metode penelitian yang digunakan oleh penulis adalah teknik pengumpulan data penelitian kualitatif, yaitu dengan menggunakan data-data sekunder yang diperoleh dari beberapa sumber dan studi pustaka seperti buku-buku, jurnal, surat kabar dan artikel-artikel dari buku maupun internet yang berkaitan dengan penelitian. Pada penelitian ini penulis menggunakan Teori Kebijakan Luar Negeri oleh K.J. Holsti. Berdasarkan teori yang digunakan, maka hasil penelitian ini menunjukkan keterlibatan Turki dalam Operasi Pembebasan Mosul memiliki dua tujuan, yaitu tujuan utama dan tujuan jangka menengah.

Kata Kunci : Turki, Iraq, Operasi Pembebasan Mosul, Tujuan Kebijakan Luar Negeri.

ABSTRACT

This study aims to know Turkish foreign policy objective in the Mosul Liberation Operation in Iraq from 2015 until 2016. As it is known that the government of Turkey has decided to involve in that military operation even though without permission of Iraqi government. Turkey's involvement was evidenced by sending troops and giving military training for Peshmerga and Sunni militia called Nineveh Guard. Research method that is used by author is qualitative data collection technique by using secondary datas such as books, journals, newspapers, articles from books or internet related to this research. In this study, author uses Foreign Policy Theory by K.J. Holsti. According to the used theory, the results of this study show that Turkey involvement in the Mosul Liberation Operation based on two objectives, which are core objective and middle range objective.

Keywords : *Turkey, Iraq, Mosul Liberation Operation, Foreign Policy Objective.*

Pendahuluan

Pada tahun 2014 kondisi domestik Iraq mengalami kekacauan dan konflik disebabkan oleh munculnya kelompok ISIS (*Islamic State of Iraq and Syria*). Kelompok yang membai'at Abu Bakar Al-Baghdadi sebagai khalifah tersebut mengklaim berdirinya Negara Islam di Iraq dan Syria. Pasca munculnya kelompok ISIS, banyak kota-kota di Iraq yang kemudian direbut oleh kelompok tersebut, seperti Sinjar, Ramadi, Fallujah, Tikrit, Samarra, Kirkuk, Baiji, Khalis, Diyala, Tal Afar, dan Mosul.

Sebagai respon atas pergerakan kelompok ISIS di Iraq, pemerintah kemudian melakukan upaya-upaya militer untuk merebut kembali kota-kota yang dikuasai oleh ISIS. Namun, diantara kota-kota yang hendak direbut kembali oleh pemerintah Iraq, Mosul merupakan kota yang memiliki nilai cukup penting. Mosul adalah pusat dari Provinsi Nineveh dan kota terbesar kedua di Iraq. Kota ini berhasil direbut oleh ISIS pada tanggal 10 Juni 2014. Untuk membebaskan Mosul dari penguasaan ISIS, sejak tahun 2015 pemerintah Iraq mulai merencanakan dan mengupayakan sebuah operasi militer yang disebut dengan *We Are Coming Nineveh Operation* atau Operasi Pembebasan Mosul. (Assi, 2016)

Turki sebenarnya tidak dilibatkan oleh pemerintah Iraq dalam operasi tersebut. Meskipun demikian, pemerintah Turki tetap berupaya agar dapat terlibat dalam Operasi Pembebasan Mosul. Upaya yang dilakukan oleh pemerintah Turki adalah bekerjasama dan memberikan bantuan militer kepada kelompok KRG (*Kurdistan Regional Government*) dan kelompok *Nineveh Guard*. Terdapat setidaknya 500 tentara Turki yang memberikan pelatihan militer kepada KRG dan pasukan Sunni di wilayah Bashiqa. (Bora, 2016)

Keterlibatan Turki tersebut ternyata menimbulkan ketegangan dengan pemerintah Iraq. Hal ini dikarenakan pemerintah Iraq menolak bantuan dan keterlibatan Turki dalam Operasi Pembebasan Mosul. Penolakan dari pemerintah Iraq sebenarnya sudah terjadi sejak tahun 2015, namun pemerintah Turki tetap berupaya mengirimkan pasukannya ke wilayah Iraq utara. Sebuah sumber dari Reuters menyebutkan bahwa beberapa minggu sebelum Operasi Pembebasan Mosul dilaksanakan, parlemen Turki memutuskan untuk memperpanjang penempatan sekitar 2000 pasukannya di Iraq utara dengan alasan untuk memerangi organisasi teroris. Menanggapi keputusan parlemen Turki tersebut, pada Bulan Oktober 2016 pemerintah Iraq telah memanggil duta besar Turki serta meminta UNSC (*United Nations Security Council*) untuk mengadakan pertemuan darurat. (Reuters, 2016)

Kebijakan pemerintah Turki untuk terlibat dalam Operasi Pembebasan Mosul menjadi fokus utama dalam penelitian ini. Kebijakan tersebut menarik untuk diteliti lebih lanjut karena sikap pemerintah Turki yang tetap berupaya terlibat dalam operasi militer di Mosul meskipun tidak mendapat izin dari pemerintah Iraq. Tindakan pemerintah Turki yang mengirimkan senjata dan pasukan ke wilayah Iraq utara tanpa izin dari pemerintah Iraq telah melanggar kedaulatan Iraq dan mencederai hubungan bilateral kedua negara. Selain itu, keputusan Turki tersebut bertentangan dengan politik luar negerinya di bawah pemerintahan AKP, yaitu “*Zero problems with neighbors*”.

Berdasarkan latar belakang permasalahan yang dipaparkan di atas, maka rumusan masalah yang diambil oleh penulis dalam penelitian ini adalah mengapa Turki bersikeras untuk terlibat dalam Operasi Pembebasan Mosul di Iraq. Penulis mengajukan dua hipotesis bahwa pemerintah Turki bersikeras untuk terlibat dalam Operasi Pembebasan Mosul karena memiliki dua tujuan, antara lain :

1. Turki ingin mencegah keterlibatan kelompok PKK dalam Operasi Pembebasan Mosul.
2. Turki ingin mencegah dominasi kelompok Syiah di Mosul pasca kota tersebut dibebaskan dari pendudukan ISIS.

Pembahasan

Kerangka Berpikir : Teori Kebijakan Luar Negeri

K.J. Holsti menjabarkan kebijakan luar negeri sebagai seperangkat tindakan dan gagasan yang dirancang oleh pembuat kebijakan suatu negara untuk memecahkan masalah atau mendorong terjadinya suatu perubahan di lingkungan eksternal negara seperti dalam kebijakan, sikap maupun tindakan yang dilakukan oleh negara lain. Penjabaran tersebut dapat dipahami bahwa kebijakan luar negeri selalu ditujukan untuk wilayah eksternal negara dan dilakukan untuk mencapai tujuan. Holsti membagi kebijakan luar negeri menjadi empat komponen, yaitu (1) orientasi kebijakan luar negeri; (2) peran nasional; (3) tujuan; dan (4) tindakan. (Holsti, 1981)

Tujuan dalam kebijakan luar negeri menurut Holsti adalah suatu gambaran keadaan peristiwa yang akan terjadi di masa depan dan rangkaian kondisi di kemudian hari yang ingin diwujudkan oleh pemerintah dengan cara membuat kebijakan luar negeri, menggunakan pengaruhnya di luar negara dan dengan mengubah atau mendukung sikap negara lain. Tujuan kebijakan luar negeri digolongkan menggunakan tiga kriteria, yaitu : (1) *value* sesuatu yang menjadi tujuan bagi para pembuat kebijakan; (2) jangka waktu yang diperlukan negara untuk mencapai tujuan kebijakan luar negeri; (3) tuntutan yang diajukan untuk negara lain. Selanjutnya tujuan kebijakan luar negeri dapat dikategorikan menjadi tiga, yaitu : (a) kepentingan dan nilai inti; (b) tujuan jangka menengah dan (c) tujuan jangka panjang universal.

a. Kepentingan dan Nilai Inti

Segala jenis kepentingan yang untuk mencapainya kebanyakan orang akan bersedia melakukan berbagai macam upaya serta pengorbanan yang besar. Nilai dan kepentingan ini biasanya dikemukakan dalam bentuk asas-asas pokok kebijakan luar negeri dan menjadi keyakinan yang diterima masyarakat tanpa sikap kritis. Kepentingan dan nilai inti ini merupakan tujuan jangka pendek, karena tujuan lain tidak dapat dicapai apabila unit politik

yang mengejanya tidak dapat mempertahankan eksistensinya sendiri. Kepentingan dan nilai inti bagi masing-masing negara tentu tidak sama, namun kebanyakan pembuat kebijakan saat ini menempatkan kedaulatan dan kemerdekaan serta mengekalkan sistem politik, sosial dan ekonomi menjadi tujuan utama dalam kebijakan luar negeri.

Beberapa negara juga beranggapan kemampuan untuk mengendalikan negara lain termasuk dalam nilai dan kepentingan inti. Hal ini disebabkan negara lain tersebut didiami oleh penduduk yang secara etnis bersaudara dengan etnis di negaranya, mempunyai sumber daya nasional yang dapat meningkatkan kekuatan negara, ataupun merupakan ancaman besar bagi integritas teritorial negaranya sendiri. Oleh karena itu, banyak negara yang berupaya mengendalikan wilayah negara lain meskipun harus mengorbankan sumber daya yang besar.

Setelah mempertahankan kedaulatan dan wilayah, kepentingan inti yang lain adalah menjaga kesatuan etnis, agama dan bahasa. Banyak negara di dunia ini yang terbentuk dengan cara memisahkan kesatuan etnis dengan sewenang-wenang, sehingga anggota etnis yang sama harus tinggal di wilayah negara yang berbeda. Hal ini berpotensi menimbulkan konflik antar negara apabila suatu negara ingin membebaskan saudara satu etnis yang dianggap sedang berada dalam penguasaan negara asing. Bagi negara yang memiliki kesatuan etnis yang terpisah-pisah, maka pemerintah menempatkan reunifikasi sebagai tujuan utama kebijakan luar negeri dan tidak jarang memberikan nilai yang sangat tinggi sehingga bersedia menggunakan kekuatan besar untuk mencapainya.

b. Tujuan Jangka Menengah

Holsti membagi tujuan jangka menengah ke dalam tiga tipe lebih lanjut :

- Tipe pertama mencakup usaha pemerintah memenuhi tuntutan dan kebutuhan perbaikan ekonomi melalui tindakan internasional. Kesejahteraan dan perbaikan ekonomi merupakan tujuan utama banyak negara di zaman ini. Namun negara-negara tersebut tidak dapat mencapai perbaikan ekonomi apabila hanya mengandalkan kemampuan sendiri, karena sumber daya nasional masing-masing negara memiliki kelebihan dan kekurangan. Untuk itu, negara harus berinteraksi dengan negara lain.
- Tipe kedua adalah meningkatkan prestise negara di dunia internasional. Terdapat pergeseran pandangan menyangkut prestise negara, yaitu di masa lalu cara utama untuk meningkatkan prestise negara adalah melalui jalur diplomatik dan unjuk kekuatan militer, namun saat ini dilakukan dengan meningkatkan industri dan bidang IPTEK. Banyak negara-negara berkembang yang melakukan pembangunan untuk meningkatkan prestisenya. Pembangunan telah menjadi salah satu tujuan nasional utama zaman ini dan negara bersedia menghabiskan banyak sumber daya untuk pembangunan.
- Tipe ketiga adalah bentuk perluasan diri atau imperialisme, baik melakukan perluasan wilayah maupun perluasan yang bersifat ideologis atau politik. Beberapa negara mengklaim wilayah negara tetangga meskipun wilayah tersebut tidak memiliki nilai strategis dan adapula negara yang tidak mengklaim wilayah namun mencari keuntungan dari negara lain seperti akses pada bahan mentah, pasar dan rute

perdagangan. Selain melakukan perluasan wilayah, negara juga seringkali melakukan perluasan yang bersifat ideologis atau politik.

c. Tujuan Jangka Panjang Universal

Tujuan jangka panjang adalah rencana, impian dan pandangan mengenai organisasi politik dan ideologi sistem internasional, aturan yang mengatur hubungan dalam sistem itu dan peran negara tertentu di dalamnya, atau dengan kata lain suatu negara memiliki impian dan keinginan untuk menyebarkan ideologinya di seluruh dunia sehingga negara-negara lain juga akan mengikuti ideologi tersebut. Berdasarkan pemaparan konsep tujuan kebijakan luar negeri oleh K.J. Holsti di atas, maka dapat dikatakan bahwa terdapat gambaran keadaan peristiwa dan kondisi di masa depan yang ingin diwujudkan oleh pemerintah Turki melalui kebijakannya dengan terlibat dalam Operasi Pembebasan Mosul. Gambaran keadaan peristiwa dan kondisi di masa depan tersebut adalah :

- Mencegah keterlibatan kelompok PKK dalam Operasi Pembebasan Mosul. Tujuan ini dapat dimasukkan ke dalam kepentingan atau nilai inti karena menyangkut dengan keamanan, integritas dan stabilitas Turki. Apabila Kelompok PKK terlibat dalam Operasi Pembebasan Mosul maka pengaruh serta pergerakan PKK di luar wilayah Turki akan semakin besar yang dikhawatirkan dapat membahayakan keamanan dan kesatuan negara.
- Mencegah dominasi Syiah di Mosul pasca dibebaskan dari pendudukan ISIS. Tujuan ini dapat dimasukkan ke dalam tujuan jangka menengah karena merupakan upaya pemerintah Turki untuk memperkuat pengaruhnya di Iraq. Apabila Mosul dikuasai oleh kelompok Syiah pasca dibebaskan dari ISIS, maka Iran dapat menyebarkan pengaruhnya di Mosul karena pemerintah Iran memiliki kedekatan dengan kelompok-kelompok Syiah Iraq. Di sisi lain, sejak pasca pemerintahan Saddam Hussain, Turki dan Iran merupakan dua negara yang saling berkompetisi untuk memperkuat pengaruhnya di Iraq. Oleh karena itu, menjadi penting bagi pemerintah Turki untuk memastikan Mosul tidak dikuasai oleh kelompok Syiah sebagai upaya memperkuat pengaruhnya dan mengimbangi pengaruh Iran.

Bentuk Keterlibatan Pemerintah Turki dalam Operasi Pembebasan Mosul

Operasi Pembebasan Mosul merupakan sebuah operasi militer yang diadakan oleh pemerintah Iraq bersama aliansinya untuk merebut kembali Kota Mosul yang telah diduduki ISIS sejak Juni 2014. Pada Hari Senin, 17 Oktober 2016, Perdana Menteri Iraq Haidar al-Abadi, mengumumkan dimulainya upaya merebut kembali Kota Mosul di bawah sebuah operasi militer yang dinamakan *We are Coming Nineveh Operation*. Upaya merebut kembali Mosul sebenarnya sudah dilakukan sejak 2015 baik oleh pemerintah Iraq maupun oleh pemerintah KRG meskipun sampai 2017 Mosul tetap belum dapat dibebaskan dari ISIS. (Assi, 2016)

Mosul merupakan salah satu kota penting sekaligus kota tertua di Iraq. Berdiri sejak 1080 SM, kota ini terletak di pusat Provinsi Nineveh dan memiliki jumlah penduduk sebesar 1,5 juta jiwa. Mosul juga merupakan kota terbesar kedua di Iraq setelah Baghdad dan terbagi menjadi 8 wilayah administratif, yaitu Al-Hadbaa, Al-Zuhur, Al-Jazaer, Al-Rabee, Kota Tua Mosul, Al-Ghizlani, Mosul Al-Jadeda, dan Al-Salam. Kota ini terbelah oleh Sungai Tigris sehingga salah satu bagiannya terletak di sebelah kanan sungai dan bagian yang lain berada di kiri sungai. Mosul terkenal dengan beragam budaya, sosial, agama dan etnisnya. Berdasarkan sejarah, Mosul merupakan kota yang heterogen karena memiliki populasi yang beragam seperti etnis Arab (mayoritas Sunni); Kurdi (mayoritas Sunni); Turkmen (Sunni dan Syiah);

Shabak (Syiah); Asiria, Arman, Chaldea (Kristen) dan Yazidi. Akan tetapi, sejak jatuh dalam kekuasaan ISIS, terjadi eksodus besar-besaran di Mosul karena ISIS melakukan kekerasan dan diskriminasi terhadap kelompok serta agama minoritas. (United Nations Human Settlements Programme in Iraq, 2016)

Pembebasan Kota Mosul dari ISIS merupakan hal yang sangat penting bagi pemerintah Iraq. Mosul adalah sebuah kota kuno bagi orang-orang Asiria dan memiliki banyak peninggalan sejarah serta pusat dari identitas negara Iraq. Namun banyak peninggalan-peninggalan sejarah tersebut yang dihancurkan oleh ISIS. Seperti yang sudah dijabarkan di atas bahwa setelah dikuasai oleh ISIS terjadi eksodus besar-besaran kelompok minoritas yang ada di Mosul, sehingga dengan membebaskan Mosul dari ISIS maka kelompok minoritas tersebut dapat kembali ke Mosul. Keberhasilan merebut Mosul dari ISIS merupakan pencapaian yang besar untuk dapat mengalahkan ISIS di seluruh Iraq. Hal tersebut dikarenakan kota ini merupakan ibukota ISIS di Iraq dan tempat pendeklarasian berdirinya ISIS oleh Abu Bakr al-Baghdadi. Setelah banyak wilayah Iraq yang berhasil direbut kembali oleh pemerintah, maka Mosul merupakan benteng terkuat ISIS yang terakhir.

Selain itu, Mosul adalah kota industri di Iraq utara yang menjadi kunci utama dalam aktivitas perdagangan dengan Turki dan Syria. Mosul merupakan kota pengeksport minyak, agrikultur, mineral dan produk-produk industri. Minyak merupakan kontributor utama dalam perekonomian Mosul sejak 1920an. Sektor industri seperti industri semen, tekstil, pakaian, gula, dan makanan mengalami perkembangan sejak 1970an dan 1980an. Mosul juga dikenal sebagai penghasil wol, kulit, industri farmasi dan tambang sulfur. Mosul memiliki lima industri semen yang semuanya dimiliki oleh *Northern Cement Company*. Menteri Perindustrian Iraq menyatakan bahwa industri semen di Mosul menghasilkan lebih dari satu juta ton semen per tahun dengan kualitas terbaik dan harga termurah dibandingkan tempat-tempat lain di Iraq. Akan tetapi, setelah Mosul dikuasai oleh ISIS, kelompok ini melakukan eksploitasi terhadap banyak perusahaan dan mengumpulkan uang dari para pemilik bisnis untuk mendanai organisasi. Banyak perusahaan yang kemudian tutup karena kondisi keamanan, kekurangan bahan mentah atau tidak adanya aliran listrik untuk operasional. ISIS juga menguasai ladang-ladang minyak, kilang minyak, perusahaan gas dan tempat pengisian bahan bakar yang ada di Mosul. Kelompok ini kemudian melakukan monopoli penjualan minyak dan mendapatkan banyak keuntungan dengan menjual minyak melalui pasar gelap. Keberadaan ISIS di Mosul pun menyebabkan terhentinya banyak program pemerintah dan perekonomian Mosul menjadi kolaps. Untuk itu, sangat penting bagi pemerintah Iraq merebut kembali Mosul dari penguasaan ISIS. (United Nations Human Settlements Programme in Iraq, 2016)

Pemerintah Iraq menyiapkan kekuatan militer dan aliansi yang cukup kuat untuk membebaskan Mosul. Kelompok ISIS sendiri diperkirakan memiliki 5000 pejuang untuk mempertahankan Mosul. Berikut ini merupakan data kekuatan militer dan aliansi yang dihimpun oleh pemerintah Iraq untuk Operasi Pembebasan Mosul :

- ISF (*Iraqi Security Forces*) : Lebih dari 50,000 militer Iraq diterjunkan dalam operasi ini. (Hum, 2016)
- *Popular Mobilization Forces* : sekitar 14,000 personil. (Hum, 2016) Berdasarkan perintah yang dikeluarkan oleh Perdana Menteri Iraq, PMF ini termasuk ke dalam institusi militer dan keamanan Iraq. PMF adalah kelompok paramiliter Iraq yang didominasi oleh milis Syiah, meskipun juga terdapat milisi Sunni, Kristen dan Yazidi di dalamnya. Ada beberapa kelompok Syiah yang berpartisipasi dalam PMF seperti

Saraya al-Islam, Badr Organization, Hezbollah Al-Noujabaa Movement, Asaeb Ahel Al-Haq, dsb. (Assi, 2016)

- Peshmerga *Forces* (Militer KRG) : 40,000 personil termasuk tentara perempuan. (Hum, 2016)
- Koalisi Internasional : Koalisi internasional yang dipimpin oleh Amerika Serikat akan terlibat dalam Operasi Pembebasan Mosul dengan memberikan pelatihan militer, konsultasi militer, intelijen, dan artileri. Setidaknya ada 500 tentara Amerika Serikat yang diterjunkan dalam operasi. (Assi, 2016) Pemerintah Inggris juga memberikan bantuan berupa pesawat tempur, drone dan 500 tentara untuk memberikan pelatihan militer kepada tentara Iraq dan Peshmerga. (The Telegraph, 2016)
- Iran : Berdasarkan pernyataan resmi dari penasehat tinggi Korps Pengawal Revolusi Islam milik pemerintah Iraq, negara ini akan terlibat dalam Operasi Pembebasan Mosul dengan menyediakan penasehat serta ahli militer kepada pemerintah Iraq dan PMF sebagai bentuk dukungan. (Assi, 2016)

Pemerintah Turki memutuskan untuk terlibat dalam Operasi Pembebasan Mosul meskipun tanpa izin dari pemerintah Iraq. Kebijakan tersebut diungkapkan oleh Presiden Erdogan melalui pernyataannya, *“We will be in the operation and we will be at the table. Our brothers are there and our relatives are there. It is out of the question that we are not involved.”*. (McKernan, 2016) Pernyataan Presiden Erdogan tersebut didukung oleh Perdana Menteri Turki, Binali Yildirim yang mengatakan bahwa militer Turki sudah berada di wilayah Bashiqa, sebuah kota di sebelah timur Mosul dan masih termasuk Provinsi Nineveh. (Aljazeera, 2016)

Meskipun Operasi Pembebasan Mosul baru dimulai pada Oktober 2016, namun pemerintah Turki sudah mengirimkan militernya ke wilayah Bashiqa sejak tahun 2015. Pemerintah Turki beralasan bahwa pengiriman militer ke wilayah Iraq tersebut adalah untuk memberikan bantuan militer kepada Peshmerga dalam memerangi kelompok ISIS. Kerjasama militer Turki-Peshmerga tersebut disetujui pada 4 November 2015 dan mulai awal Desember 2015 pemerintah Turki mengirimkan setidaknya 150 tentara beserta 20 hingga 25 tank ke Bashiqa. (Hurriyet Daily News, 2015)

Pengiriman sejumlah tentara dan alutsista tersebut ternyata tidak mendapat persetujuan dari pemerintah Iraq. Bahkan Menteri Luar Negeri Iraq menyebut penempatan pasukan oleh Turki sebagai sebuah “serangan”. Perdana Menteri Iraq, Haider al-Abadi menyatakan bahwa tidak ada izin dari pemerintah Iraq bagi penempatan setidaknya satu batalion tentara Turki di area dekat Mosul, Provinsi Nineveh. Oleh karena itu, sebagai bentuk protes pemerintah Iraq memutuskan memanggil duta besar Turki untuk Iraq dan meminta Turki segera menarik kembali pasukannya. (Aljazeera, 2015)

Meskipun mendapat penolakan dari pemerintah Iraq, akan tetapi Turki tetap belum menarik militernya. Presiden Erdogan memberikan sebuah pernyataan yang dikutip oleh New York Times, *“We have a historical responsibility in the region. If we want to be both at the table and in the field, there is a reason”*. Turki mengklaim bahwa penempatan pasukannya di wilayah Iraq adalah berdasarkan permintaan dari KRG dan mantan Gubernur Mosul, Atheel al-Nujaifi agar Turki memberikan bantuan serta pelatihan militer kepada Peshmerga dan *Nineveh Guard*. *Nineveh Guard* merupakan kelompok paramiliter Sunni yang dipimpin oleh Atheel al-Nujaifi. Sebelum Operasi Pembebasan Mosul dimulai setidaknya sudah ada 500 militer Turki yang ditempatkan di Bashiqa dan menjelang dimulainya operasi, parlemen Turki justru memutuskan untuk memperpanjang penempatan sebanyak 2000 pasukannya di seluruh wilayah Iraq utara dengan alasan untuk memerangi organisasi teroris. Deputy Perdana Menteri Turki, Numan Kurtulmuş mengatakan bahwa setidaknya ada 3000

pasukan yang sudah dilatih oleh militer Turki akan bergabung dalam Operasi Pembebasan Mosul. Pemerintah Iraq sangat mengutuk kebijakan pemerintah Turki dan memperingatkan bahwa kebijakan tersebut dapat menimbulkan perang regional. Bahkan pemerintah Iraq juga meminta kepada UNSC (*United Nations Security Council*) agar mengadakan pertemuan darurat untuk membahas isu tersebut. (Bora, 2016)

Tujuan Turki dalam Operasi Pembebasan Mosul

1. Mencegah Keterlibatan PKK (*Partiya Karkeren Kurdistan*) Dalam Operasi Pembebasan Mosul

Kebijakan Turki untuk tetap terlibat dalam Operasi Pembebasan Mosul meskipun mendapat penolakan dari pemerintah Iraq tentu diambil berdasarkan tujuan yang ingin dicapai oleh pemerintah Turki. Tujuan utama yang mendasari diambilnya kebijakan tersebut adalah pemerintah Turki ingin mencegah keterlibatan kelompok PKK (*Partiya Karkeren Kurdistan*) dalam Operasi Pembebasan Mosul. Tujuan ini dapat dimasukkan ke dalam kepentingan atau nilai inti karena menyangkut dengan keamanan, integritas dan stabilitas Turki. Apabila Kelompok PKK terlibat dalam Operasi Pembebasan Mosul maka pengaruh serta pergerakan PKK di luar wilayah Turki akan semakin besar yang dikhawatirkan dapat membahayakan keamanan dan kesatuan negara.

PKK (*Partiya Karkeren Kurdistan*) dibentuk pada tahun 1978 oleh Abdullah Ocalan. Tujuan awal kelompok ini adalah untuk mendirikan sebuah Negara Kurdistan yang independen dan sosialis di wilayah Turki tenggara. Namun seiring berjalannya waktu, kelompok ini hanya menuntut otonomi wilayah dan hak politik serta kebudayaan yang lebih luas untuk Suku Kurdi yang ada di Turki. Kelompok PKK seringkali terlibat konfrontasi dengan pemerintah bahkan melakukan penyerangan di berbagai wilayah di Turki. Karena aktivitas pemberontakan yang dilakukan tersebut, PKK merupakan kelompok terlarang bahkan dianggap sebagai organisasi teroris oleh pemerintah Turki, Amerika Serikat dan Uni Eropa.

Meskipun PKK muncul di Turki dan fokus pergerakannya adalah menuntut pemerintah Turki, akan tetapi kelompok ini juga berkembang hingga ke wilayah negara-negara tetangga seperti Syria utara dan Iraq utara. Pemerintah Turki telah melakukan berbagai upaya untuk memerangi kelompok PKK, termasuk memperbaiki hubungan bilateralnya dengan Syria, Iraq dan Iran. Untuk menghadapi strategi Turki tersebut, PKK kemudian bekerjasama dengan organisasi Suku Kurdi lainnya yang ada di Syria, Iraq dan Iran, seperti *Kurdistan Democratic Solution Party* (Iraq), *the Democratic Union Party* atau *Partiya Yekîtiya Demokrat* (Syria) dan *the Party of Free Life for Kurdistan* atau *Partiya Jiyana Azad a Kurdistanê* (Iran). Pemerintah Turki juga bekerjasama dengan KRG untuk memerangi PKK karena markas utama kelompok tersebut berada di Pegunungan Qandil yang masuk ke dalam wilayah kekuasaan KRG. (International Crisis Group, 2012)

Pergerakan PKK di Iraq utara mengalami perkembangan ketika kelompok ini bergabung dalam operasi militer untuk membebaskan Sinjar dari pendudukan ISIS. Sinjar merupakan sebuah kota yang terletak di sebelah barat laut Provinsi Nineveh. Kota ini berjarak 117 km dari Mosul dan termasuk dalam rute suplai ISIS yang menghubungkan

Mosul dengan Raqqa di Syria. Sinjar didominasi oleh orang-orang Kurdi Yazidi yang menjadi korban kekerasan dan pembunuhan oleh ISIS selama menguasai wilayah tersebut. PBB memperkirakan sebanyak 3000 orang Yazidi dibunuh dan 6000 lainnya ditawan oleh kelompok ISIS. (Shackle, 2017) Pendudukan ISIS di Sinjar juga menyebabkan 200.000 orang Yazidi berupaya melarikan diri namun sebanyak 50.000 terlantar di Gunung Sinjar. (Burns, 2016)

Setelah ISIS berhasil menguasai Sinjar pada Agustus 2014, koalisi internasional yang dipimpin oleh Amerika Serikat segera melakukan operasi militer untuk merebut kembali kota tersebut. Operasi militer dilakukan dengan melibatkan kekuatan kelompok-kelompok Kurdi seperti Peshmerga, PKK, YPG (*Yekineyen Parastina Gel* atau militer Kurdi Syria) dan YBS (*Yekineyen Berxwedana Sengale* atau militer Yazidi Sinjar). Peshmerga melancarkan serangan ke Gunung Sinjar dari wilayah Rabia pada 19 Desember 2014. (Burns, 2016) Selain itu, upaya penyelamatan orang-orang Yazidi oleh kelompok-kelompok Kurdi termasuk PKK juga dilakukan tidak lama setelah ISIS berhasil menguasai Sinjar. Penyelamatan dilakukan dengan membuka rute aman bagi orang Yazidi yang terlantar di Gunung Sinjar untuk mengungsi ke wilayah KRG dan wilayah kelompok Kurdi di Syria. Setidaknya 30.000 orang Yazidi berhasil diselamatkan dalam upaya tersebut. (Middle East Eye, 2014)

Upaya merebut kembali Kota Sinjar berlangsung selama kurang lebih 15 bulan hingga kota tersebut berhasil dibebaskan dari ISIS pada November 2015. Amerika Serikat melakukan serangan udara terhadap ISIS di Sinjar pada 5 November 2015. Sementara itu, koalisi Kurdi yang mencakup PKK, YPG, YBS, dan Peshmerga melakukan serangan darat dari Gunung Sinjar lalu bergerak menuju ke dalam kota. Kelompok PKK yang terlibat dalam operasi militer tersebut melakukan serangan terhadap ISIS dari arah utara dan barat. (Burns, 2016)

Keterlibatan PKK dalam operasi pembebasan Sinjar memberikan pengaruh cukup signifikan bagi pergerakan kelompok tersebut. PKK yang berafiliasi dengan YPG berhasil mendapatkan simpati dari YBS dan orang-orang Yazidi Sinjar. Sebelum jatuh pada pendudukan ISIS, Sinjar berada dalam kontrol KRG dan Peshmerga. Namun ketika ISIS memasuki Kota Sinjar pada Agustus 2014, militer Peshmerga justru meninggalkan kota dalam pendudukan ISIS. Hal tersebut menimbulkan kemarahan dan menurunnya kepercayaan orang-orang Yazidi terhadap Peshmerga. Peshmerga dianggap telah membiarkan ISIS melakukan pembantaian terhadap Yazidi di Sinjar. Kelompok PKK dan YPG kemudian memanfaatkan kondisi tersebut dengan masuk ke wilayah Sinjar dan menyelamatkan orang-orang Yazidi yang terlantar di Gunung Sinjar setelah melarikan diri dari ISIS. YPG dan PKK berhasil membuka rute aman untuk mengungsikan orang-orang Yazidi ke wilayah Rojava, Syria. Selain itu kedua kelompok tersebut juga membangun kamp pengungsi di Derik, Syria. (Dirik, 2014)

Lebih lanjut, YPG memberikan pelatihan militer kepada orang-orang Yazidi agar dapat memberikan perlawanan terhadap ISIS. Pelatihan tersebut dilakukan di pangkalan militer Qamishli, Syria. (Boudlal, 2014) Kelompok PKK juga ikut memberikan pelatihan militer kepada orang-orang Yazidi di sebuah kamp pelatihan dekat Kota Derik, Syria. Seorang Yazidi bernama Mohammed Maura memberikan pernyataan mengenai partisipasi orang-orang Yazidi dalam pelatihan militer untuk melawan ISIS, "*The PKK helped us to escape the area and to reach the safety of the camp, so why shouldn't join now?*". (Sherlock, 2014) Lebih dari 1000 orang Yazidi mendapatkan pelatihan militer tersebut. Kelompok YBS juga beraliansi dengan PKK dan YPG untuk memperkuat perlawanan terhadap ISIS di Sinjar. (Burns, 2016)

Peran penting PKK dan YPG dalam membebaskan Kota Sinjar merupakan sebuah peringatan bagi Turki bahwa pergerakan PKK di Iraq utara mengalami perkembangan yang cukup signifikan, terutama setelah PKK berhasil mendapatkan simpati dari orang-orang Yazidi dan YBS. PKK yang sangat mendukung feminisme dan peran perempuan dalam politik juga mendirikan *Sinjar Women's Defense Unit* pada tahun 2015. (Ali O. , 2017)

Setelah berperan penting dalam membebaskan Kota Sinjar, Kelompok PKK juga menyatakan ingin terlibat dalam Operasi Pembebasan Mosul. Sarhad Wardo, kepala divisi hubungan media di *the Kurdistan Communities Union* (kelompok Kurdi yang berafiliasi dengan PKK), memberikan pernyataan, "*It is because of the cleanliness of our fight, the residents of Mosul have called for the PKK's participation*". (The New Arab, 2016) Keterlibatan PKK dalam Operasi Pembebasan Mosul menimbulkan kekhawatiran pemerintah Turki. Juru bicara kepresidenan Turki, Ibrahim Kalin, menyatakan dalam sebuah konferensi pers tanggal 12 Oktober 2016 bahwa keterlibatan PKK dalam Operasi Pembebasan Mosul hanya akan menambah permasalahan di regional Timur Tengah. Lebih lanjut, ia menyatakan, "*Reports that the PKK may take part in the Mosul operation greatly worry us,*". (Daily Sabah, 2016)

Apabila PKK mendapat izin untuk terlibat maka hal tersebut maka PKK dapat semakin meningkatkan pengaruh serta menjadi entitas politik yang diakui eksistensinya. (Iddon, 2016) Oleh karena itu, pemerintah Turki juga ingin terlibat dalam Operasi Pembebasan Mosul agar dapat mencegah keterlibatan PKK dalam operasi tersebut. Bahkan pemerintah Turki meminta Amerika Serikat untuk tidak melibatkan PKK dan semua kelompok yang terafiliasi dengan PKK dalam Operasi Pembebasan Mosul. Amerika Serikat juga memberikan jaminan kepada Turki bahwa PKK dan aliansinya tidak akan terlibat dalam operasi militer tersebut. (Yetkin, 2016)

2. Mencegah Dominasi Syiah di Mosul Pasca Pendudukan ISIS

Holsti membagi tujuan jangka menengah menjadi tiga tipe, yaitu : 1. perbaikan ekonomi, 2. meningkatkan citra atau prestise negara, dan 3. perluasan diri baik dalam hal wilayah atau perluasan secara ideologis dan politik. Tujuan kedua pemerintah Turki yang ingin terlibat dalam Operasi Pembebasan Mosul termasuk ke dalam tujuan jangka menengah, yaitu mencegah dominasi Syiah di Mosul pasca dibebaskan dari penguasaan ISIS. Tujuan ini dimasukkan ke dalam tujuan jangka menengah karena merupakan upaya pemerintah Turki untuk memperkuat pengaruhnya di Iraq. Apabila Mosul dikuasai oleh kelompok Syiah pasca dibebaskan dari ISIS, maka Iran dapat menyebarkan pengaruhnya di Mosul karena pemerintah Iran memiliki kedekatan dengan kelompok-kelompok Syiah Iraq. Di sisi lain, sejak pasca pemerintahan Saddam Hussain, Turki dan Iran merupakan dua negara yang saling berkompetisi untuk memperkuat pengaruhnya di Iraq. Oleh karena itu, menjadi penting bagi pemerintah Turki untuk memastikan Mosul tidak dikuasai oleh kelompok Syiah sebagai upaya memperkuat pengaruhnya dan mengimbangi pengaruh Iran.

Sejak Amerika Serikat menarik pasukannya dari Iraq selama tahun 2009 hingga 2011, Turki dan Iran muncul sebagai dua kekuatan baru yang berkompetisi untuk menempatkan pengaruhnya di Iraq. Pasca kudeta terhadap rezim Saddam Hussain tahun 2003, Iran berupaya untuk memperbaiki hubungan bilateralnya dengan Iraq. Iran memanfaatkan

hubungannya dengan aktor-aktor politik dan partai politik Iraq serta *soft power* yang dimiliki dalam sektor ekonomi dan agama untuk menyebarkan pengaruhnya di Iraq. Iran bekerjasama dengan kelompok Syiah dan aliansinya seperti *Islamic Supreme Council of Iraq (ISCI)*, *the Badr Organization*, dan *the Islamic Dawa Party* untuk mempengaruhi dinamika perpolitikan di Iraq. Tujuan Iran adalah menyatukan partai-partai yang ada di kelompok Syiah sehingga mereka dapat memanfaatkan populasi Syiah yang merupakan mayoritas penduduk di Iraq untuk menjadi pengaruh politik di negara tersebut. Jika kelompok syiah memiliki pengaruh dalam perpolitikan Iraq maka kelompok ini kemudian dapat mengkonsolidasikan kontrolnya terhadap pemerintah. (Eisenstadt, 2011)

Selain menggunakan jalan politik, Iran juga menggunakan *soft power* untuk menyebarkan pengaruhnya di Iraq. Misalnya, dalam sektor ekonomi Iran merupakan partner dagang yang penting bagi Iraq. Jumlah volume perdagangan kedua negara tersebut mencapai 5 milyar dollar Amerika pada 2013 dan 2014. Iran banyak melakukan ekspor ke Iraq seperti makanan, material, peralatan rumah tangga hingga perlengkapan mobil. Investor-investor dari Iran juga banyak beroperasi di Baghdad, Iraq selatan dan *Kurdistan Regional*. Selain melalui ekonomi, Iran juga menyebarkan pengaruhnya melalui media elektronik terutama berita-berita di televisi, meskipun cara tersebut tidak terlalu efektif. (Eisenstadt, Policy Analysis : Iran and Iraq, 2015)

Melihat upaya Iran dalam menyebarkan pengaruhnya di Iraq, maka menjadi penting bagi Turki untuk turut memperkuat pengaruhnya agar dapat mengimbangi Iran. Persaingan politik dua negara tersebut tampak pada pemilu Iraq tahun 2010. Jika Iran memberikan dukungannya kepada koalisi *National Iraqi Alliance* yang didominasi oleh kelompok Syiah, maka Turki mendukung koalisi *al-Iraqiyya* yang berpaham sekuler. Selain Iran, Turki juga merupakan partner dagang yang penting bagi Iraq. Pada tahun 2010 jumlah volume perdagangan Iran-Iraq mencapai 5 milyar dollar Amerika, sedangkan jumlah volume perdagangan Turki-Iraq mencapai 6 milyar dollar Amerika. Perusahaan dan investor Turki banyak beroperasi di wilayah Iraq utara, sedangkan perusahaan dan investor Iran banyak beroperasi di wilayah Iran selatan serta ibukota. Untuk itu, menteri luar negeri Iraq tahun 2010, Hoyshar Zebari menyatakan bahwa Turki dan Iran adalah aktor eksternal sekaligus rival yang memiliki pengaruh di Iraq. Keinginan Iran untuk membentuk pemerintahan Iraq yang didominasi oleh Syiah dapat memberikan ancaman bagi negara-negara Sunni seperti Turki. Oleh karena itu, menjadi penting bagi pemerintah Turki untuk mempertahankan pengaruhnya serta mencegah dominasi Syiah dan Iran baik di Mosul maupun di Iraq secara lebih luas.

Kemunculan ISIS di Iraq memberikan ancaman sekaligus peluang bagi Iran. ISIS merupakan kelompok militan Sunni yang sangat memusuhi Syiah sehingga Iran menjadi musuh utama bagi ISIS. Kehadiran ISIS yang mampu menguasai sepertiga wilayah Iraq tidak hanya memberikan ancaman bagi pemerintah Iraq tetapi juga ancaman bagi kepentingan Iran. Namun, di sisi lain keberadaan ISIS membuka peluang bagi Iran untuk menunjukkan pengaruh dan kekuatannya di Timur Tengah. Kampanye anti ISIS oleh pemerintah Iran menjadi pengingat bagi masyarakat Iraq bahwa Iran adalah aktor yang terkuat di Iraq. Pemerintah Iraq pun mengandalkan milisi Syiah yang memiliki kedekatan dengan Iran untuk menghentikan perkembangan kelompok ISIS. (Nader, 2015)

Iran juga mengirim cabang militernya yang dikenal dengan *Islamic Revolutionary Guards Corps (IRGC)*. IRGC berpartisipasi dalam operasi militer untuk membebaskan Kota Amirli di Provinsi Salah al-Din dari kepungan ISIS. Selain itu, pembebasan Kota Jurf Al-Sakhar juga dilakukan oleh pemerintah Iraq bersama dengan Iran dan 15.000 milisi yang

hampir seluruhnya adalah Syiah. Dua hari setelah ISIS berhasil menguasai Mosul pada Juni 2014, Iran segera mengirimkan bantuannya berupa penasehat-penasehat militer beserta senjata. Penasehat tinggi IRGC memberikan pernyataan Iran akan terlibat dalam operasi tersebut dengan menyediakan penasehat serta ahli militer untuk pemerintah Iraq dan PMF (*Popular Mobilization Forces*) sebagai bentuk dukungan. PMF adalah kelompok paramiliter Iraq yang didominasi oleh milisi Syiah, meskipun juga terdapat milisi Sunni, Kristen dan Yazidi. *The Badr Organization*, milisi Syiah yang memiliki hubungan sangat dekat dengan Iran juga terlibat di PMF untuk memerangi ISIS di Mosul. (Nader, 2015)

Kebijakan pemerintah Turki tersebut diambil berdasarkan tujuan pemerintah yang ingin memperkuat pengaruhnya di Mosul serta mencegah dominasi milisi Syiah pasca Mosul dibebaskan dari ISIS. Apabila Mosul dikuasai oleh Syiah maka dampak yang timbul adalah Iran dapat menyebarkan pengaruhnya di Mosul dan Iraq secara lebih luas melalui milisi-milisi Syiah yang menjadi aliansinya. Oleh karena itu, menjadi penting bagi pemerintah Turki untuk memperkuat pengaruhnya agar dapat mengimbangi Iran. Selain itu, dampak lain apabila Mosul dikuasai oleh Syiah dikhawatirkan akan terjadi kembali konflik sektarian Sunni-Syiah seperti yang terjadi tahun 2006. Maka, sebagai negara mayoritas Sunni, pemerintah Turki menginginkan agar Mosul tetap ditempati oleh Muslim Sunni pasca dibebaskan dari ISIS.

Kesimpulan

Pemerintah Turki tetap berupaya untuk terlibat dalam Operasi Pembebasan Mosul meskipun tidak mendapat izin dari pemerintah Iraq. Keterlibatan tersebut ditunjukkan dengan mengirimkan pasukan militer dan alutsista ke wilayah Bashiqa, Iraq. Selain itu, militer Turki juga melakukan pelatihan militer dengan kelompok Peshmerga dan *Nineveh Guard*. Tindakan pemerintah Turki tersebut ternyata menimbulkan ketegangan dengan Iraq bahkan pemerintah Iraq telah memanggil duta besar Turki sebagai bentuk protes.

Kebijakan pemerintah Turki untuk terlibat dalam Operasi Pembebasan Mosul di Iraq didasarkan pada tujuan yang ingin dicapai, yaitu kepentingan atau nilai inti dan tujuan jangka menengah. Kepentingan atau nilai inti pemerintah Turki terlibat dalam operasi tersebut adalah untuk mencegah keterlibatan kelompok PKK dalam Operasi Pembebasan Mosul. Sedangkan tujuan menengah pemerintah Turki terlibat dalam Operasi Pembebasan Mosul adalah mencegah dominasi kelompok Syiah di Mosul pasca kota tersebut dibebaskan dari pendudukan ISIS.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Holsti, K. (1981). *International Politics A Framework for Analysis*. New Delhi: Prentice-Hall of India Private Limited.

Report

Ali, O. (2017). *The PKK's Growing Influence in Northern Iraq : Beyond The Renewed Tension in Sinjar*. Ankara: ORSAM.

Assi, A. W. (2016). *Battle of Mosul data and expetations*. Gaziantep: Jusoor for Studies Center.

Burns, R. (2016). *Battle for Sinjar, Iraq*. Kansas: Analysis and Control Element Threats Integration.

Eisenstadt, M. (2011). *Iran's Influence in Iraq : Countering Tehran's Whole-of-Government Approach*. Washington DC: the Washington Institute for Near East Policy.

International Crisis Group. (2012). *Turkey : The PKK and a Kurdish Settlement*. Brussels: International Crisis Group.

Nader, A. (2015). *Iran's Role in Iraq*. California: RAND Corporation.

United Nations Human Settlements Programme in Iraq. (2016). *City Profile of Mosul, Iraq : Multi-sector Assessment of a City Undersiege*. United Nations Human Settlements Programme.

Website

Aljazeera. (2016, 10 24). *Battle for Mosul: Turkey Confirms Military Involvement*. Dipetik 3 11, 2018, dari Aljazeera: <https://www.aljazeera.com/news/2016/10/battle-mosul-turkey-confirms-military-involvement-161023144053661.html>

Aljazeera. (2015, 12 6). *Iraq summons Turkey ambassador over troop 'incursion'*. Dipetik 3 11, 2018, dari Aljazeera: <https://www.aljazeera.com/news/2015/12/iraq-demands-withdrawal-turkish-troops-mosul-151205061510572.html>

Bora, B. (2016, 10 14). *Analysis : What is Turkey Trying To Achieve in Iraq*. Dipetik 1 18, 2018, dari Aljazeera: <http://www.aljazeera.com/news/2016/10/analysis-turkey-achieve-iraq-161013032856045.html>

Boudlal, Y. (2014, 8 18). *Kurdish Militants Train Hundreds of Yazidis to Fight Islamic State*. Dipetik 3 21, 2018, dari Reuters: <https://www.reuters.com/article/us-syria-crisis-yazidis/kurdish-militants-train-hundreds-of-yazidis-to-fight-islamic-state-idUSKBN0GH0G220140818>

Daily Sabah. (2016, 10 13). *Turkey Raises Concern Over PKK Terrorists Involving in Mosul Operation*. Dipetik 4 26, 2018, dari Daily Sabah: <https://www.dailysabah.com/politics/2016/10/13/turkey-raises-concern-over-pkk-terrorists-involving-in-mosul-operation>

- Dirik, D. (2014, 9 2). *The 'other' Kurds fighting the Islamic State*. Dipetik 3 21, 2018, dari Aljazeera: <https://www.aljazeera.com/indepth/opinion/2014/09/other-kurds-fighting-islamic-stat-2014928753566705.html>
- Eisenstadt, M. (2015, 9 13). *Policy Analysis : Iran and Iraq*. Dipetik 3 23, 2018, dari The Washington Institute: <http://www.washingtoninstitute.org/uploads/Documents/opeds/Eisenstadt20150913-IranPrimer.pdf>
- Hum, T. (2016, 10 25). *Battle for Mosul : How ISIS is Fighting To Keep Its Iraqi Stronghold*. Dipetik 3 10, 2018, dari CNN: <https://edition.cnn.com/2016/10/24/middleeast/iraq-mosul-isis-tactics/>
- Hurriyet Daily News. (2015, 12 5). *Turkish military to have a base in Iraq's Mosul*. Dipetik 3 11, 2018, dari Hurriyet Daily News: <http://www.hurriyetdailynews.com/turkish-military-to-have-a-base-in-iraqs-mosul-92113>
- Iddon, P. (2016, 10 18). *Why The PKK Wants to Participate in The Mosul Operation*. Dipetik 3 22, 2018, dari Rudaw: <http://www.rudaw.net/english/middleeast/iraq/181020162>
- McKernan, B. (2016, 10 17). *Turkey will fight Isis in Mosul, President Erdogan says* . Dipetik 3 11, 2018, dari Independent: <http://www.independent.co.uk/news/world/middle-east/mosul-attack-turkey-isis-erdogan-says-troops-will-fight-in-offensive-a7365296.html>
- Middle East Eye. (2014, 8 7). *Kurds Unite to Fight Militants, Rescue 30,000 Yazidi Civilians*. Dipetik 3 20, 2018, dari Middle East Eye: <http://www.middleeasteye.net/news/kurds-unite-oust-militants-bid-rescue-yazidi-civilians-881764545>
- Reuters. (2016, 10 6). *Iraq Requests U.N. Emergency Meeting on Turkish Troops in North*. (R. Boulton, Penyunting) Dipetik 1 18, 2018, dari Reuters: <https://www.reuters.com/article/us-mideast-crisis-iraq-turkey/iraq-requests-u-n-emergency-meeting-on-turkish-troops-in-north-idUSKCN1260Z2?il=0>
- Shackle, S. (2017, 11 7). *Yazidis in Iraq : 'The Genocide is Ongoing'*. Dipetik 3 9, 2018, dari Aljazeera: <https://www.aljazeera.com/news/2017/11/yazidis-iraq-genocide-ongoing-171105064140012.html>
- Sherlock, R. (2014, 8 18). *'It is Time to Take Up Arms' : Yazidi Volunteers Fight Back Against Islamic State*. Dipetik 3 21, 2018, dari The Telegraph: <https://www.telegraph.co.uk/news/worldnews/middleeast/iraq/11041011/It-is-time-to-take-up-arms-Yazidi-volunteers-fight-back-against-Islamic-State.html>
- Tavernise, S. (2006, 12 23). *District by District, Shiites Make Baghdad Their Own*. Dipetik 3 27, 2018, dari The New York Times: <https://www.nytimes.com/2006/12/23/world/middleeast/23shiites.html>
- The New Arab. (2016, 10 19). *Kurdish Militia PKK Ready to Join Battle for Mosul*. Dipetik 4 25, 2018, dari The New Arab: <http://www.alaraby.co.uk/english/news/2016/10/19/kurdish-militia-pkk-ready-to-join-battle-for-mosul>
- Telegraph, T. (2016, 10 17). *What is the battle for Mosul?* Dipetik 1 27, 2018, dari The Telegraph: <http://www.telegraph.co.uk/news/2016/10/17/what-is-the-battle-for-mosul-isis-last-bastion-of-power-in-iraq/>

The Telegraph. (2016, 10 17). *What is the battle for Mosul? Everything You Need to Know About the Fight to Liberate Isil's Last Bastion of Power in Iraq* . Dipetik 3 12, 2018, dari The Telegraph: <https://www.telegraph.co.uk/news/2016/10/17/what-is-the-battle-for-mosul-isils-last-bastion-of-power-in-iraq/>

Ugurlu, S. (2016, 10 27). *Erdogan Says Sinjar Will not be 'New Qandil' for PKK*. Dipetik 3 21, 2018, dari Anadolu Agency: <https://aa.com.tr/en/politics/erdogan-says-sinjar-will-not-be-new-qandil-for-pkk/673511>

Yetkin, M. (2016, 10 8). *US Assures Turkey of 'no PKK Affiliate' in Mosul Operation*. Dipetik 3 22, 2018, dari Hurriyet Daily News: <http://www.hurriyetaidailynews.com/opinion/murat-yetkin/us-assures-turkey-of-no-pkk-affiliate-in-mosul-operation-104740>